

## Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2019-2022

Karunia Putri Gustami<sup>1</sup>, Sonny Fransisco<sup>2</sup>, Farah Azzahra Rachmawati<sup>3</sup>,  
Bunga Fatma Nur<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bina Sarana Informatika

Alamat: Jl. Margonda No.8, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Korespondensi penulis: [karuniaputrigustami@gmail.com](mailto:karuniaputrigustami@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study was conducted to determine the measurement of the financial performance of the Depok City Government during the 2019-2022 period with value of money measurement indicators using the calculation of three ratios, namely: independence, effectiveness, and efficiency. This research uses descriptive quantitative data analysis method with secondary data processed and obtained from [ppid.depok.go.id](http://ppid.depok.go.id). The results of this study indicate that Depok City Government finances have a good level of independence, a very effective level of effectiveness but have an inefficient level of efficiency. Financial performance is still inefficient because the amount of expenditure realization is still high and there is no effort to cut expenditure spending each year to improve the efficiency of financial performance.*

**Keywords:** *Budger Realization, Financial performance, Public Sector Budget.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan untuk menentukan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok selama periode 2019-2022 dengan indikator pengukuran value of money menggunakan perhitungan tiga rasio, yaitu: kemandirian, efektifitas, dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan dengan metode analisis data kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diolah dan diperoleh dari [ppid.depok.go.id](http://ppid.depok.go.id). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Kota Depok memiliki tingkat kemandirian yang baik, tingkat efektifitas yang sangat efektif namun memiliki tingkat efisiensi yang tidak efisien. Kinerja keuangan masih tidak efisien dikarenakan jumlah realisasi belanja masih tinggi dan tidak ada upaya pemangkasan pengeluaran belanja di setiap tahunnya untuk meningkatkan efisiensi kinerja keuangan.

**Kata kunci:** Anggaran Sektor Publik, Kinerja Keuangan, Realisasi Anggaran.

### LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin pesat tentu menuntut banyak perubahan khususnya pasca era reformasi yang juga mendorong perubahan signifikan dalam sistem penganggaran daerah dan didukung oleh berbagai undang -undang seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999(Periansya et al., 2021). Undang-undang tersebut tentunya menjadi landasan yang sangat kuat dan memberikan banyak kewenangan pada pemerintah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri yang disertai dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya. Anggaran daerah sendiri berperan sebagai alat monitoring terhadap kegiatan pemerintah, perencanaan dan proses implementasi pelayanan publik baik dalam bentuk pemerataan infrastruktur, meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas, pemanfaatan sumber daya daerah maupun terlaksananya standar pelayanan publik di berbagai daerah.

Pada dasarnya adanya penganggaran daerah dibuat untuk mengurangi ketergantungan pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat yang disebut sebagai “Otonomi Daerah”

yang mana F.Sugeng Istianto (1971) menerima bahwa hal tersebut menyiratkan hak dan wewenang suatu daerah untuk mengawasi dan mengurus keluarganya sendiri di wilayahnya sendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk merencanakan, menyusun, mengesahkan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri anggaran daerahnya. Lalu setelah proses demi proses dan periode anggaran berakhir, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang mencatat dan melaporkan secara terperinci pendapatan yang diterima dan pengeluaran belanja selama periode anggaran. Nantinya laporan keuangan tersebut akan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan menjadi acuan untuk evaluasi serta pertanggungjawabannya kepada publik.

Laporan keuangan pemerintahan daerah menggambarkan bagaimana suatu daerah mendapatkan dan mengelola sumber pendapatannya. Kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan dapat ditentukan melalui pengukuran kinerja keuangan daerah dengan cara menganalisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu daerah dan realisasi anggarannya. Pengukuran kinerja keuangan daerah akan digunakan untuk meningkatkan kembali kinerja pemerintah dan komunikasi kelembagaan dalam mencapai akuntabilitas publik.

Dalam pengukuran kinerja keuangan daerah, akuntansi sektor publik memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Akuntansi sektor publik berkontribusi menganalisis dan interpretasi data keuangan dalam bentuk rasio keuangan daerah yang dapat mengungkapkan kondisi keuangan suatu daerah (Rezkowati, 2020). Hasil analisis rasio keuangan ini dinyatakan dalam suatu angka rasio atau suatu besaran yang merupakan perbandingan antara nilai suatu rekening tertentu dalam laporan keuangan dengan nilai rekening lainnya.

Pemerintah Kota Depok merupakan sektor publik yang juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerahnya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sama seperti daerah lainnya (Studi et al., 2021). Sebagai upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok sangat penting untuk mengidentifikasi kemampuan Pemerintah Kota Depok dalam mengelola keuangannya.

Oleh karena itu kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran kota Depok dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2022. Dengan melakukan penelitian ini, kami akan mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Kota Depok telah berhasil mengelola sumber daya keuangannya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu penelitian ini nantinya akan mengidentifikasi area

dimana efisiensi dan efektifitas dapat ditingkatkan sekaligus memberikan sumber informasi untuk perencanaan keuangan di masa depan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi Sektor Publik adalah disiplin logis yang berhubungan dengan administrasi moneter dan pengungkapan elemen area publik, termasuk badan legislatif, yayasan publik, dan badan usaha milik negara. Dalam situasi khusus ini, kita harus menyelidiki lebih jauh pentingnya, kualitas, jenis dan luasnya pembukuan publik untuk mendapatkan data yang lebih menyeluruh.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjelmaan dari rencana daerah dan rencana jangka panjang. kelas menengah yang terbentuk berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Proses APBD mulai dari rencana gaji, penggunaan provinsi dan pendanaan selama satu tahun. APBD tersebut disiapkan oleh pemerintah daerah provinsi, kemudian dibahas dan didukung oleh Badan Kewenangan Negara Teritorial sehingga pada akhirnya menjadi barang sah sebagai Pedoman Provinsi yang wajib diikuti oleh pemerintah daerah. Setiap pendapatan dan konsumsi provinsi harus dicatat dan diawasi dalam APBD.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah tidak akan ada tanpa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh aktivitas yang mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian, tanggung jawab dan pengawasan dana lokal. Dengan LKPD, ini merupakan bentuk tanggung jawab atas rencana keuangan yang diperoleh Pemerintah Provinsi. Dalam lingkungan pemerintahan provinsi, setiap pengguna anggaran belanja baik satuan kerja wilayah SKPD maupun SKPKD disebut sebagai unsur akuntansi, yang diharapkan dapat membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana keuangan yang dikelola. Laporan keuangan dibentuk untuk disampaikan kepada beberapa substansi untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan moneter di tingkat pemerintah terdekat. Unsur pengungkapnya adalah pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh SKPKD dan strukturnya berupa Laporan Moneter Pemerintahan Teritorial.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kuantitatif deskriptif dengan mendeskripsikan fakta secara objektif menggunakan angka melalui pengumpulan data yang dihasilkan dari keadaan yang sebenarnya. Data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkot Depok periode 2019-2022 yang bersifat sekunder dan diperoleh melalui [ppdi.depok.go.id](http://ppdi.depok.go.id). Dalam penelitian ini analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok ditentukan dengan indikator pengukuran value for money menggunakan tiga rasio yaitu rasio kemandirian, efektifitas, dan efisiensi yang ditulis dengan rumus sebagai berikut:

**Rasio Kemandirian**

Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah, operasional, dan pelayanan masyarakat adalah rasio kemandirian pemerintah daerah (Silvianingsih & Rani, 2022). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjamann}} \times 100$$

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat digambarkan melalui rasio kemandirian ini. Semakin tinggi besaran rasio maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan berlaku sebaliknya (Lutfiyana & Munandar, 2022). Berikut tabel rasio kemandirian dengan keterkaitan pola hubungan dengan pemerintah pusat dan kemampuan keuangannya:

**Tabel 1.** Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25%	Instructive
Rendah	>25 - 50%	Consultative
Sedang	>50 - 75%	Partisipative
Tinggi	>75 - 100%	Delegative

**Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas keuangan daerah membandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan awal daerah yang direncanakan (Halim, 2007:325). Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Ewektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

**Tabel 2.** Nilai Efektifitas

<b>Presentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

### Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan korelasi antara biaya absolut yang dikeluarkan untuk memperoleh pendanaan dengan pendanaan asli yang diterima. Keuangan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan tergolong efektif apabila proporsi pencapaiannya di bawah 1 (satu) atau di bawah 100 persen.

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Total\ Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Total\ Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100$$

**Tabel 3.** Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

<b>Presentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
100%-Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Semakin rendah rasio efisiensi menandakan kinerja keuangan pemerintahan daerah yang baik. Oleh karena itu, agar pemerintah daerah dapat menentukan efektif tidaknya besaran pendapatan yang diterimanya, maka harus memperhitungkan dengan tepat biaya-biaya yang diperlukan untuk merealisasikan seluruh pendapatan tersebut (Lutfiyana & Munandar, 2022). Hal tersebut perlu dilakukan karena menurut Halim (2013:234) walaupun pemerintah daerah sudah unggul dalam memahami fokus pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan, namun pencapaian tersebut tidak signifikan dengan asumsi yang menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target pendapatan tersebut lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli yang diperoleh (Halawa & Putri, 2023)

Untuk mempermudah dalam menentukan indikator yang digunakan dalam proses analisis serta skala dari variable yang terdapat dalam penelitian ini maka peneliti membutuhkan tabel operasional variable. Penelitian ini menggunakan tiga variabel untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok pada tahun 2019-2022, yaitu:

**Tabel 4.** Operasional Variabel

<b>Variable</b>	<b>Indikator</b>
Kemandirian	- Realisasi PAD - Realisasi pendapatan transfer
Efektifitas	- Realisasi PAD - Anggaran PAD
Efisiensi	- Realisasi total belanja - Realisasi total pendapatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok pada tahun 2019-2022 peneliti menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diperoleh dari website resmi PPID Kota Depok dengan indikator pengukuran value for money menggunakan tiga rasio, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah:

### 1. Rasio Kemandirian

Hasil dari analisis rasio kemandirian ini mengidentifikasi kemampuan Kota Depok dalam membiayai semua kegiatan operasional dan pembangunan untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Rasio kemandirian juga menunjukkan seberapa besar Pemerintah Kota Depok mengandalkan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya.

Rasio kemandirian menunjukkan seberapa besar manfaat masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan partisipasi masyarakat. Perhitungan dari rasio kemandirian Pemerintah Kota Depok pada tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.** Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

<b>Periode</b>	<b>Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Realisasi Pendapatan Transfer</b>	<b>Tingkat Kemandirian (%)</b>	<b>Keterangan</b>
2019	1.293.003.769.037	1.758.865.812.107	74%	Sedang
2020	1.214.939.201.530	1.692.035.384.452	72%	Sedang
2021	1.536.968.635.023	1.712.394.211.949	90%	Tinggi
2022	1.642.228.601.282	2.003.029.027.362	82%	Tinggi

Sumber: Data Sekunder Diolah

Dari data sekunder yang diolah diatas diketahui bahwa Pemerintah Kota Depok memiliki tingkat kemandirian “sedang” terhitung pada tahun 2019-2020 lalu mengalami peningkatan dan berubah status menjadi “tinggi” pada tahun 2021-2022. Penurunan tingkat kemandirian sendiri diketahui terjadi pada tahun 2020 sebesar 2% dari tahun 2019

akibat *pandemic covid-19* yang melumpuhkan hampir seluruh daerah di Indonesia. Akan tetapi, seperti yang terlihat pada Gambar 1. terdapat peningkatan kemandirian yang cukup drastis di tahun 2021 yaitu sebesar 90%. Namun sangat disayangkan penurunan kembali terjadi menjadi 82% pada tahun 2022.

Penurunan tingkat rasio di tahun 2019-2020 menunjukkan pola hubungan partisipatif yang berarti masih ada ketergantungan dari Pemerintah Kota Depok terhadap bantuan atau pendapatan lainnya dari luar baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Meskipun begitu peningkatan sampai ke pola hubungan delegative di tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok masih mandiri dalam melakukan otonomi daerah. Itu artinya kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan PAD sudah terbilang cukup baik meskipun belum termasuk ideal. Besarnya pengetahuan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi juga dapat dilihat dari cukup baiknya rasio kemandirian yang dihasilkan.

## 2. Rasio Efektivitas

Kemampuan Pemerintah Kota Depok dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan disebut dengan rasio efektivitas. Apabila tingkat rasio efektifitas yang dicapai melebihi 100% maka kinerja Pemerintah Kota Depok termasuk efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan pendapatannya akan meningkat ketika rasio efektivitasnya semakin tinggi. Hasil efektivitas kinerja Pemerintah Kota Depok pada tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.** Rasio Efektivitas

Periode	Realisasi Penerimaan PAD	Target penerimaan PAD	Tingkat efektivitas (%)	Keterangan
2019	1.293.003.769.037	1.138.499.654.711	114%	Sangat Efektif
2020	1.214.939.201.530	1.140.891.422.838	106%	Sangat Efektif
2021	1.536.968.635.023	1.349.600.629.760	114%	Sangat Efektif
2022	1.642.228.601.282	1.543.043.585.869	106%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan Gambar 2, dapat dikatakan bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kota Depok periode 2019-2022 sudah sangat efektif karena tingkat efektivitasnya diatas 100%. Rasio efektifitas tertinggi yaitu di tahun 2019 dan 2021 dengan jumlah yang sama sebesar

114% dan terendah berada di tahun 2020 dan 2022 dengan jumlah yang sama juga sebesar 106%.

Secara garis besar hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok mempunyai keterbukaan yang baik dalam memahami sasaran yang telah ditetapkan serta dapat meningkatkan dan mengawasi dengan baik melalui pungutan, tuntutan, dan sumber lainnya.

### 3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi mengidentifikasi sejauh mana Pemerintah Daerah Depok mengawasi dan memanfaatkan aset moneter nya secara ideal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perbandingan antara jumlah uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dan jumlah uang yang sebenarnya diperoleh digambarkan dengan rasio ini.

Apabila hasil nilai rasio efisiensi yang diperoleh kurang dari 80% maka kinerja Pemerintah Kota Depok dapat dikatakan efisien atau semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien dan sebaliknya. Berikut adalah hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Kota Depok pada tahun 2019-2022:

**Gambar 3.** Rasio Efisiensi

Periode	Realisa Belanja	Realisasi Pendapatan	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
2019	3.231.267.376.079	3.236.277.806.392	100%	Kurang efisien
2020	3.199.202.687.103	3.059.775.185.315	105%	Tidak Efisien
2021	3.267.620.863.110	3.396.023.758.232	96%	Kurang efisien
2022	3.614.127.822.783	3.664.656.173.029	99%	Kurang efisien

Sumber: Data Sekunder Diolah

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok dari tahun 2019-2022 diketahui masih belum memasuki kategori cukup efisien atau belum memenuhi standar efisien. Pengolahan data sekunder menunjukkan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Depok masih kurang efisien, bahkan dinyatakan tidak efisien di tahun 2020 karena masih menunjukan tingkat rasio diatas 80%.

Rasio efisiensi masih menggambarkan kurangnya kinerja Pemerintah Kota Depok yang kurang efisien dalam membelanjakan pengeluarannya. Secara tidak langsung pendapatan Kota Depok masih kurang baik karena pengeluarannya masih lebih erat hubungannya dengan pendapatan yang direalisasikan. Meskipun pada tahun 2021 rasio efisiensi sempat menurun namun kembali meningkat di tahun 2022 dikarenakan kurangnya pengontrolan terhadap anggaran belanja.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok pada tahun 2019-2022 adalah bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kota Depok selama tahun 2019-2020 memiliki tingkat kemandirian yang baik yaitu dari sedang sampai tinggi dengan rata-rata rasio 79,5%. Hasil juga menunjukkan rendahnya ketergantungan Pemerintah Kota Depok dengan Pemerintah pusat dari pola hubungannya yang partisipatif dan berubah menjadi delegative.

Selain itu rasio efektifitas Pemerintah Kota Depok selama tahun 2019-2022 menunjukkan sudah sangat efektif dengan rata-rata rasio 110%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok telah berkinerja baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun sangat disayangkan rasio efisiensi Pemerintah Kota Depok selama tahun 2019-2022 menunjukan kurang efisien dengan jumlah rata-rata rasio 100%. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok masih dikategorikan kurang efisien karena diketahui masih besar realisasi belanja dibandingkan realisasi pendapatannya. Hal ini juga disebabkan karena tidak ada upaya pemangkasan pengeluaran belanja dari Pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan efisiensi kinerja keuangannya.

Hasil dari penelitian ini ditujukan kepada Pemerintahan Kota Depok dan juga dapat dijadikan acuan untuk pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan kembali kinerja keuangan daerahnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif sebagai sumber pendapatan asli daerah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Halawa, L. W., & Putri, C. M. (2023). Menggunakan prinsip value for money pada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Manajemen*, 2(1), 77–89.
- Lutfiyana, E., & Munandar, A. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah wilayah Kota Cirebon (anggaran tahun 2015-2019). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(8), 3721–3729. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/download/1524/1269>
- Periansya, Pratama, M. D., Armaini, R., & A.R, S. (2021). Analysis performance South Sumatra Provincial Government budget. *Journal Name*, 07(01), 1–10.
- Rezkowati, N. (2020). Analisa kinerja keuangan organisasi sektor publik (Studi kasus Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu). *Jurnal Ilmiah Universitas Teknologi Sulawesi Utara*, 8, 38–44. <http://jiutsu.com/index.php/jiutsu/article/view/40>  
<http://jiutsu.com/index.php/jiutsu/article/download/40/19>

Silvianingsih, R., & Rani, U. (2022). Analisis kinerja keuangan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bogor tahun 2014-2019. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.97>

Studi, P., Fakultas, M., Universitas, E., Nabilah, B., & Moorcy, N. H. (2021). Analisis efektivitas, efisiensi, dan capaian kinerja. *Jurnal Media Riset Ekonomi*, 2(2), 95–103.